Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik
ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 |
Website: http://jakp.fisip.unand.ac.id|Lisensi:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/|
Email: Jakpfisipunand@soc.unand.ac.id |

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PASCA PANDEMIC DI INDONESIA

Arif Nugroho[1], Ihin Solihin[1], Jumanah[1*], Yuni Dwi Cahyani[1], Ikhda Ratri Auladatisyifa[1], Riyan Herdiana[1]
[1]Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Banten, Indonesia
[*] Co respondent Author: jumanah1011@gmail.com

Article Information

Submitted : 29/06/2023
Review : 14/08/2023
Accepted : 13/09/2023
Published : 30/10/2023

DOI

https://doi.org/10.25077/jakp.8.2.186-204.2023

Keywords

Covid-19; Policy Implementation; Tourism

Abstract

The Covid-19 outbreak emerged in early 2020, crippling global economic activities, including the tourism sector in Indonesia. The decline in the number of tourists visiting Indonesia had a significant impact on the country's economy. It is a significant responsibility for the government to formulate policies for the post-pandemic development of tourism in Indonesia. One of the policies for the development of the tourism sector is the concept of the "new normal." This policy must be effectively implemented to revive tourism in Indonesia.

The method used in writing this article employs a literature review study method. This method involves reviewing research from Google Scholar's database and relevant articles related to the discussed topic, which are then processed using appropriate tools.

Based on the results of the literature review study, the implementation of post-pandemic tourism development policies in Indonesia involves three elements: sustenance, self-esteem, and freedom from servitude. These elements are realized when the health protocol requirements in the new normal setting are adhered to. These three elements are significant considerations for the government when deciding whether to reopen or postpone operations in the tourism sector due to their profound social, economic, and environmental impacts. Other government strategies or efforts in implementing tourism development policies in the era of the new normal include promoting local tourism, emphasizing voluntarism and solidarity, and making policies based on sustainable development.

PENDAHULUAN

Virus Corona (Covid-19) muncul pada awal tahun 2020, membuat masyarakat global dalam ambang keprihatinan, karena seluruh warga dunia berpotensi terkena wabah tersebut. Pandemi Covid-19 telah meluas dan menyebar secara global tidak kurang dari 218 negara yang telah terpapar termasuk Indonesia. Selain bahaya mematikan bagi masyarakat yang terinfeksi,virus ini juga mematikan aktivitas global. Hampir semua negara wajib mengaktifkan mekanisme respon darurat melalui penguncian wilayahnya (lockdown) dan melarang masyarakatnya untuk beraktivitas di luar rumah (Wiwik 2020; Purwanda & Achmad, 2022).

Mekanisme Respon darurat tersebut melumpuhkan aktivitas sumber perekonomian secara global, termasuk aktivitas perekonomian yang didapat dari sektor pariwisata.Pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19. Pandemi ini memaksa negara melakukan pembatasan sosial serta larangan kunjungan wisatawan antar daerah maupun dari luar negeri. Dampak nyata yang terlihat adalah pekerja sektor ini mengalami penurunan penghasilan, khususnya yang terkait penyedia akomodasi dan makanan serta minuman; perdagangan besar dan eceran; reparasi motor dan mobil; serta pergudangan dan transportasi (BPS, 2020).

Aktivitas wisata di berbagai belahan dunia pun diperkirakan anjlok sampai 90% (mediaindonesia. Diakses pada tanggal 20/11/2020).Industri Pariwisata di Indonesia juga mengalami dampak krisis tersebut, Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia mengalami penurunan, dan berdampak pada okupansi seluruh hotel di Indonesia yang mengalami penurunan sekitar 12,67% dari total tahun sebelumnya di 2019. Banyak tenaga kerja yang bergerak dibidang industri pariwisata mengalami pemutihan akibat krisis tersebut,tercatat dalam situs resmi Kemenparekraf sekitar 409 ribu tenaga kerja dirumahkan. Padahal sektor pariwisata menyumbang pendapatan ekonomi sebesar 49,22%bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia (Saridi et al. 2021). Kerugian yang ditimbulkan pada sektor pariwisata Indonesia hingga US$9 miliar atau setara Rp 135 triliun.(Suastika, 2021)

Proses dalam pembuatan kebijakan publik yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak terlepas dari peran-peran masing-masing aktor pemangku atau stakeholders yang terlibat. Berbagai tahapan yang harus dijalankan dalam proses pembuatan kebijakan publik, salah satunya yaitu implementasi kebijakan yang menjadi tahapan krusial dalam proses kebijakan publik.

Menurut pendapat Thomas R. Dye (dalam Islamy, 2000:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "Is whatever governments choose to do or not to do" ("apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan").

Implementasi kebijakan menurut Budi Winarno (2012: 147) memiliki konsep yang dipahami sebagai tahap dalam proses kebijakan publik yang dilakukan dan tidak terlepas dari proses sebelumnya yaitu formulasi kebijakan di mana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan, program kebijakan serta upaya penyelesaian masalah publik. Implementasi kebijakan sangat berkaitan dengan sebuah keputusan dan tindakan-tindakan yang dijalankan secara sistematis untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Implementasi kebijakan publik juga dilihat dari segi proses yang mencakup segala tindakan sesuai dengan keputusan yang diambil. Masalah dalam masyarakat tidak hanya berkaitan dengan permasalahan sosial yang berdampak pada kalangan masyarakat tertentu, akan tetapi juga berkaitan dengan permasalahan bencana yang perlu tindakan sigab dalam penanganannya (Ariyanti, 2015: 24).

Di setiap provinsi daerah memiliki keunggulan sebagai pendapatan daerah. Banyak kendala yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata di daerah, namun dari semua itu sumber daya manusia yang sebagai pengelola merupakan faktor kunci dalam pembangunan pariwisata daerah. Kemampuan dari sumber daya manusia yang mengelola pariwisata daerah haruslah memiliki kemampuan yang baik dalam keilmuan sehingga dapat menerapkannya pada saat bekerja nanti. Kesalahan dalam mengelola potensi menjadi objek wisata akan berakibat buruk di masa mendatang dalam Berkaitan dengan upaya mengatasi Covid-19 di Indonesia, regulasi-regulasi yang dibuat oleh para menteri mengenai pembatasan sosial berskala besar menjadi salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran coronavirus yang semakin tinggi. Kegiatan pariwisata memang banyak terkait dengan alam, sehingga erat kaitannya dengan masalah lingkungan. Oleh sebab itu, syarat untuk tetap atau meningkatkan pengembangan sektor wisata adalah dengan melibatkan masyarakat sepenuhnya. Partisipasi masyarakat lokal sangat dibutuhkan untuk menjaga ketahanan destinasi.

Pemerintah telah mengeluarkan sistem tatanan baru yang disebut sebagai new normal, agar sektor pariwisata harus kembali dikembangkan dan menjadi rencana strategis pasca Covid-19. Hal ini menjadi tugas besar bagi Pemerintah Indonesia untuk melihat peluang dan ancaman yang akan menghantam sektor pariwisata pasca covid- 19.

Berdasarkan hal itu, tentu banyak faktor yang mempengaruhi beroperasinya kembali pariwisata di Indonesia dalam tatanan new normal. Salah satunya adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, artikel ini akan mengulas bagaimana Pemerintah akan mengimplementasikan kebijakan dalam mengembangkan pariwisata pasca pandemic di Indonesia di era new normal.

Dampak Pandemic bagi pariwisata memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pariwisata di Indonesia, beberapa penelitian mengungkapkan dampak melemahnya sektor pariwisata terhadap tingginya angka pengangguran karena menurunnya jumlah wisatawan yang datang ke tempat pariwisata baik dari daerah maupun mancanegara. Beberapa tempat pariwisata sangat bergantung pada wisatawan. Selain menurunnya jumlah wisatawan yang disebabkan pandemi Covid-19, Kondisi pariwisata yang ada di Indonesia juga menghadapi beberapa resiko lain diantaranya ancaman perubahan iklim, serta kerusakan alam. Dampak pandemic bagi pariwisata juga terjadi di beberapa wilayah misalnya terhentinya sektor pariwisata tidak hanya terjadi di jenis wisata belanja dan wisata kuliner di Kota Bandung yang sudah terkenal dengan jenis wisata tersebut, tetapi juga terhadap jenis wisata lainnya seperti wisata sejarah, wisata alam dan wisata budaya. Implikasi dari kondisi tersebut berdampak langsung kepada industri pariwisata yang ada di Kota Bandung. Kerugian tidak hanya berdampak kepada penyelenggaraan pariwisata secara langsung, tetapi juga kepada sektor industri penunjang pariwisata seperti jasa transportasi/travel, hotel, dan lain sebagainya(Herdiana, 2020). Banyuwangi juga merupakan daerah yang pariwisatanya terdampak pandemic, awalnya tidak begitu berpengaruh secara signifikan, kondisi berubah drastis dan hal tersebut diluar prediksi bahwa penyelenggaraan event pariwisata yang sudah diprogramkan sebelumnya seperti launching Calender of Event (CoE) Banyuwangi 2020 sebanyak 123 event terancam gagal selenggarakan. . Hal tersebut diatas menyebabkan terjadinya aktivitas kepariwisataan di Banyuwangi lumpuh sehingga serta menyebabkan masalah baru bagi masyarakat dan perekonomiannya yang semula semakin baik menjadi nol kembali(Kanom et al., 2020). Dampak pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini juga sangat menekan industri pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) DIY bahkan menaksir ada angka potensi kerugian (potensial loss) sebesar Rp 27 miliar, lantaran tak terealisasinya target kunjungan wisata di bulan Maret-Mei 2020 (Harian Tribun Jogja, Senin 20 Juli 2020:3).Jadi dengan adanya pelarangan kunjungan wisatawan

asing, berdampak pendapatan pemerintah dan pekerja industri pariwisata mengalami penurunan penghasilan sangat drastis(Sugiharta, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi sektor pariwisata Indonesia di tengah pandemi Covid-19, langkah yang ditempuh pemerintah dalam pemulihan sektor pariwisata akibat adanya pandemi Covid-19 serta pengimplementasian kebijakan tersebut dalam mengembangkan pariwisata pasca pandemic di Indonesia di era new normal.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan kepustakaan yaitu proses pengambilan data dari berbagai sumber referensi yang mendukung penulisan ini serta didapat dari kajian studi literature review sebagaimana yang disampaikan penelitian review dari database google scholar dan artikel yang relevan dengan topik yang dibahas dan diolah menggunakan tools.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu menyimak dan mencatat informasi yang penting dalam analisis data dengan cara reduksi data, display data dan gambaran kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Hasil Pemetaan Bibliometrik

Bibliometrik didasarkan pada perhitungan dan analisis statistik luaran ilmiah berupa artikel, publikasi, kutipan, paten, dan indikator lain yang lebih kompleks (Nurul & Winoto, 2022). Laporan tersebut, setelah menetapkan latar belakang pengembangan bibliometrik, menyajikan database tempat pembuatan bibliometrik, serta indikator utama yang digunakan.Untuk mendalami hasil meta analisis, pada bagian ini akan disajikan grafik visual mapping dari 789 artikel terkait kebijakan pariwisata.

Hasil visualisasi jaringan dari 789 artikel peta kata dengan tema implementasi kebijakanpengembangan pariwisata pasca pandemic di Indonesia, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Co-authorship Authors

   Menggunakan software VOSviewer, kami menemukan pemetaan bibliometrik penulis seperti pada gambar berikut. Semakin besar bentuknya dan semakin cerah warnanya menandakan bahwa penulis semakin banyak menerbitkan tulisannya yang berkaitan dengan implementasi kebijakanpengembangan

pariwisata pasca pandemic di indonesia.

Gambar 1. Co-authorship Authors Density Visualization

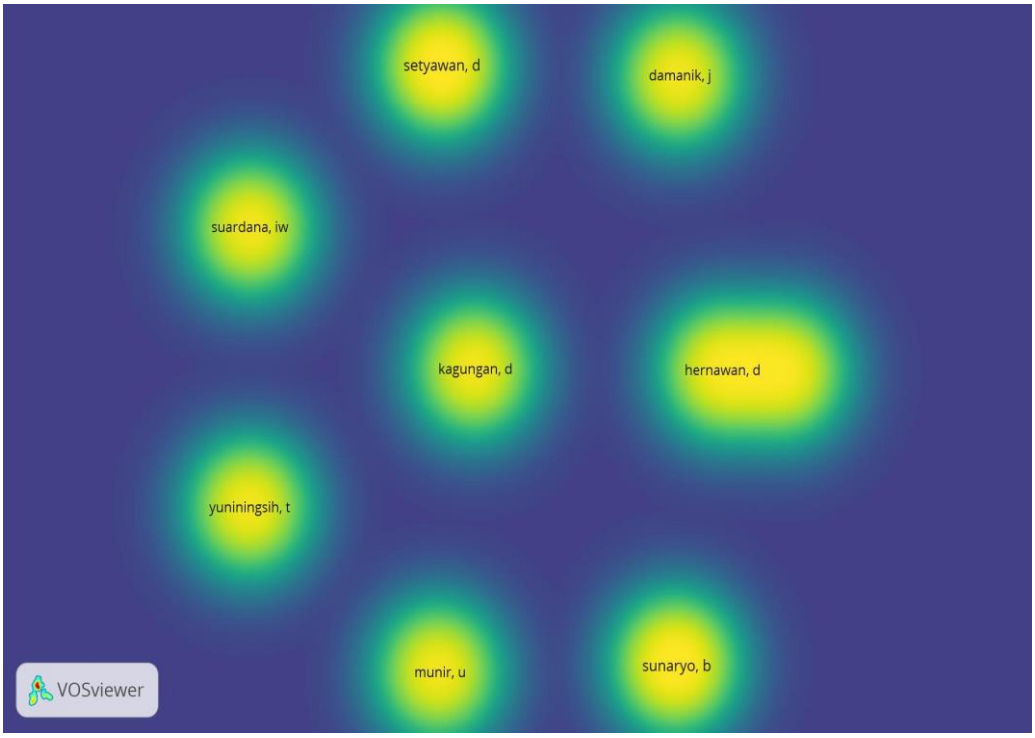

Sumber: Penulis, 2023

Gambar 2. Co-authorship Authors Overlay Visualization

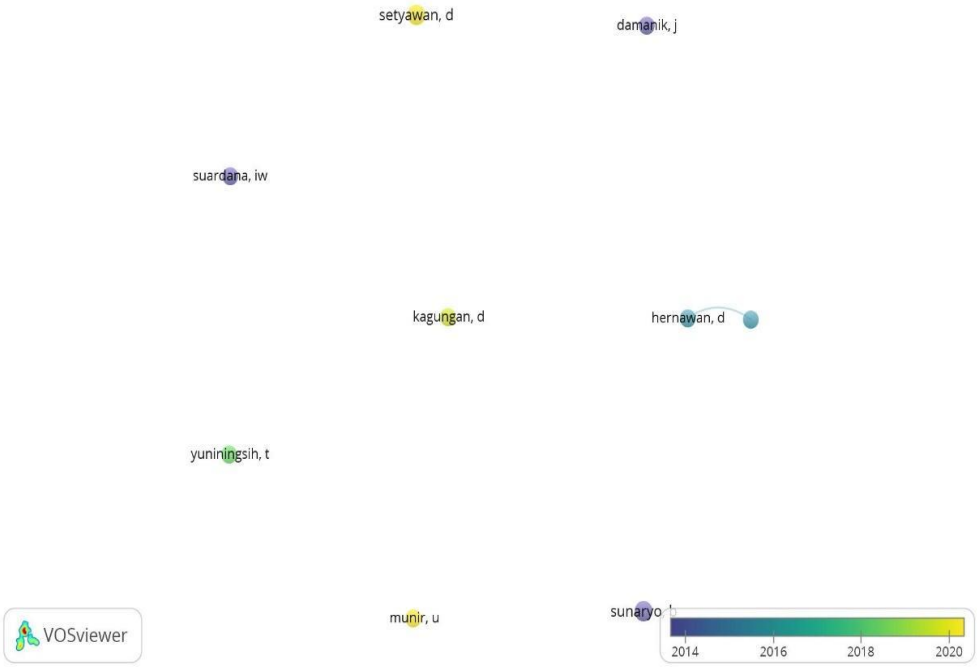

Sumber: Penulis, 2023

Secara umum setiap peneliti memiliki kecenderungan yang berbeda-beda.

Beberapa menulis terindeks sebagai penulis tunggal, yang lain menulis bersama dengan peneliti lain sehingga muncul beberapa cluster yang ditunjukkan dengan kepadatan yang berbeda. Berdasarkan hasil tersebut semakin besar dan terang nama penulisnya, maka semakin banyak pula makalah yang diterbitkaAdapun beberapa penulis tersebut yakni; pertama IW Suardana dalam judulnya analisis kebijakan pengembangan pariwisata (intervensi melalui kebijakan pariwisata berkelanjutan di Bali) membahas terkait pariwisata dipandang sebagai suatu sistem yang saling terkait dan saling berinteraksi. Dibutuhkan sinergi kebijakan dengan pendekatan multisektor dan multidisiplin(Suardana, 2016).

Kedua Janianton Damanik dalam judulnya new normal policy promosi kebijakan pariwisata dalam rangka percepatan penanganan dampak Covid-19 membahas tentang kebijakan pemerintah bidang pariwisata mengadopsi rekomendasi strategi yang disampaikan oleh UNWTO, yaitu: program mitigasi dan pemulihan sektor pariwisata meliputi program perlindungan sosial bagi pekerja di sektor pariwisata, program padat karya bagi pekerja yang bergerak di bidang pariwisata dan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif(Mutiara et al., 2021).

Ketiga Dodi Setiawan dalam judulnya implementasi kebijakan pemerintaH kota Batu dalam mewujudkan kota pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan membahas terkait belum terlaksananya pengimplementasian tersebut dengan baik karena terdapat faktor penghambat yaitu kurangnya pendidikan pada stakeholder dan faktor pendukung terlaksananya kebijakan ini yaitu: izin pembangunan obyek wisata harus menggunakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Obot & Setyawan, 2017).

Keempat Tri Yuniningsih dalam judulnya analisis komponen pengembangan pariwisata desa wisata wonolopo kota Semarang membahas Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo belum dikatakan optimal. Hal tersebut disebabkan karena masih belum optimalnya komponen-komponen pengembangan pariwisatanya. Pengelolaan atraksi belum optimal. Dikarenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat sekitar, adanya ketidakadilan masyarakat akan Desa Wisata Wonolopo karena mereka merasa tidak mendapatkan manfaat apa-ada dengan adanya Desa Wisata Wonolopo Saat ini Desa Wisata Wonolopo sedang mengembangkan atraksi wisata yaitu Omah Ampiran(Chaerunnisa &

Yuningsih, 2020).

Kelima Dian Kagungan dalam judulnya strategi media branding pengembangan sektor pariwisata kabupaten pesisir barat sebagai destinasi wisata internasional membahas implementasi strategi media branding pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat sebagai destinasi wisata internasional yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam hal ini meliputi penetapan tujuan tahunan dimana dalam hal ini Dinas Pariwisata ingin menjadikan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat mengalami peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung di setiap tahunnya khususnya wisatawan mancanegara(Vianti et al., 2021).

Keenam Muhammad Misbahul Munir dalam judulnya resiliensi ekonomi rumah tangga muslim yogyakarta masa adaptasi pandemi Covid-19 membahas Resiliensi ekonomi pelaku usaha rumah tangga muslim bahwa mereka tetap berusaha survive meski tertatih menghadapi besarnya dampak Covid-19. Berbagai strategi dan usaha dilakukan untuk tetap bertahan. Setidaknya ada tiga Langkah utama sebagai upaya untuk tetap survive di masa pandemic dan adaptasi dari wabah tersebut yaitu pertama,menguatkan kreativitas dan strategi pemasaran produk menggunakan media online. Kedua, penguatan komunitas online atau komunitas media sosial untuk saling bertukar jual-beli produk, sebagai sarana memenuhi kebutuhan pokok maupun upaya membangun solidaritas senasib sepenanggungan untuk saling menguatkan. Ketiga, optimalisasi sinergi produsen, supplier dengan reseller secara offline maupun online, secara offline dengan sistem konsinyasi sementara secara online dengan mengembangkan sistem fee affiliate marketing(Muhammad Misbahul Munir, 2021).

Ketujuh Broto Sunaryo dalam judulnya keberadaan moda transportasi umum tidak bermotor dalam mendukung aktivitas pariwisata di kawasan Malioboro, Yogyakarta membahas bahwa keberadaan moda transportasi tidak bermotor di kawasan Malioboro didukung oleh kegiatan pariwisata. Selain itu keberadaan andong dan becak masih dipertahankan karena andong dan becak menjadi bagian dari aktivitas wisata yaitu sebagai salah satu icon daya tarik bagi wisatawan. Keberadaannya masih dapat dipertahankan dengan berbagai catatan yaitu yaitu kualitas, kemampuan, kenyamanan, keamanan dan juga kelayakannya harus ditingkatkan (Trisnawati 1 et al., 2014).

Terakhir kedelapan yaitu Hary Hermawan dalam judulnya dampak

pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal membahas bahwa pangembangan desa wisata Nglanggeran cenderung membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal. Untuk itu pengembangan desa wisata dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal hendaknya tetap dijalankan secara berkelanjutan(Hermawan, 2016).

b. Co-occurrence All Key Word

VOSViewer juga dapat menemukan pemetaan bibliometric kata kunci yang paling banyak digunakan oleh penulis dalam tema implementasi kebijakanpengembangan pariwisata pasca pandemic di Indonesia. Pemetaan bibliometrik dari kata kunci yang digunakan dapat dilihat pada gambar dibawah. Kata kunci yang memiliki bentuk lebih besar menandakan bahwa kata tersebut lebih banyak digunakan dalam jurnal yang berhubungan dengan tema implementasi kebijakanpengembangan pariwisata pasca pandemic di Indonesia.

Gambar 3. Co-occurrence All Key Word Network Visualization

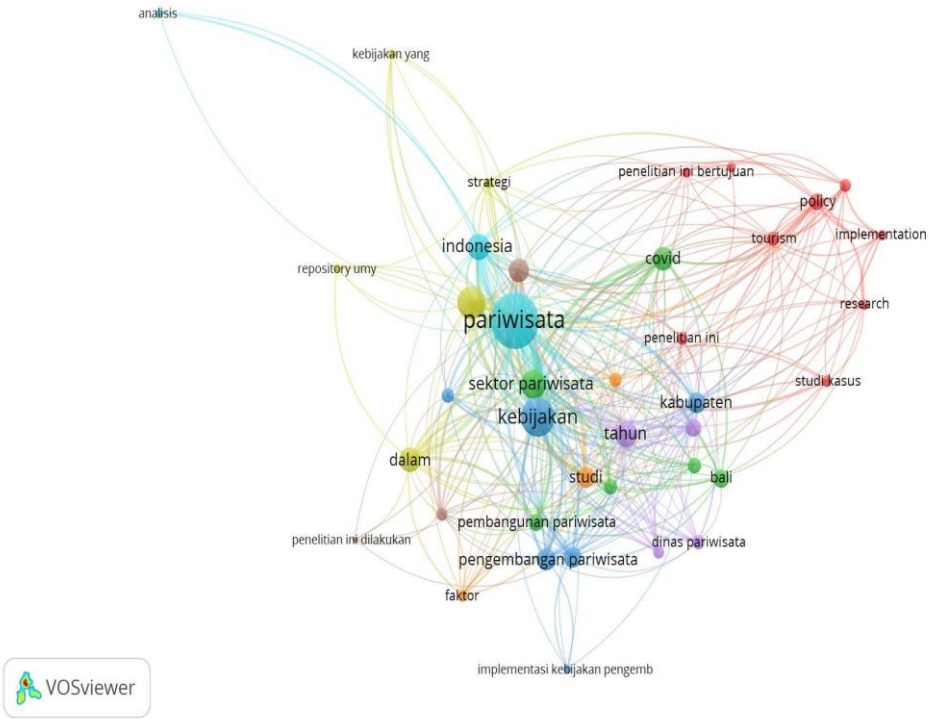

Sumber: Penulis

Data ini dapat digunakan untuk mengetahui trend kata kunci dalam beberapa terakhir.Analisis bibliometrik menunjukkan beberapa kata kunci yang banyak digunakan dalam makalah yang menjadi objek penelitian. Semakin banyak kata

kunci yang muncul, semakinluas indikasi lingkaran yang paling banyak. Sedangkan hubungan garis antar kata kunci menunjukkan seberapa banyak keterkaitannya dengan kata kunci lainnya.

c. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pasca Pandemic Di Indonesia

Wabah Covid-19 yang merebak pada awal tahun 2020 membawa dampak yang signifikan dalam peri kehidupan umat manusia di seluruh dunia.Pandemi Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19)disebabkan oleh virus SARS-COV-2 yang berasal dari Kota Wuhan pada Desember 2019 dan menyebar dengan cepat di seluruh dunia. Usaha mengurangi penyebaran penyakit berujung pembatasan mobilitas secara masif. Optimisme pemulihan awal, berdasarkan keberhasilan penemuan vaksin efektif pada akhir 2020(Tran-Nam et al., 2021).

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia Dalam mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 adalah dengan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020, mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Pemerintah menutup tempat wisata yang berpotensi untuk membentuk kerukunan masyarakat. Hal ini berimbas pada melemahnya sektor pariwisata global dengan estimasi kerugian hingga miliaran dolar. Industri Pariwisata di Indonesia juga mengalami dampak krisis tersebut, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia mengalami penurunan, sehingga berdampak pada perekonomian di Indonesia yang turun drastis.

Berikut merupakan perbandingan jumlah pengunjung mancanegara yang masuk ke Indonesia tahun 2018-2020 :

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Wisatawan dari Mancanegara di Indonesia pada Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Wisatawan
2018	15.810.305
2019	16.106.954
2020	4.052.923

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Berdasarkan tabel 1 menunjukan bahwa pada tahun 2018 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 15.810.305 kunjungan, terdapat kenaikan jumlah wisatawan pada tahun 2019 yaitu berjumlah 16.6.954 kunjungan. Namun,

setelah adanya Covid-19, jumlah kunjungan internasional yang datang ke Indonesia pada tahun 2020 menurun sangat drastis menjadi hanya 4.052.923 kunjungan.(Yasinta et al., 2021).

Sektor pariwisata menyumbang kontribusi signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat 15,81 juta kunjungan wisatawan mancanegara dengan pertumbuhan sebesar 12,58% dan mampu menyumbang devisa sebesar USD 19,3 Miliar. Kontribusi sektor pariwisata mampu mengurangi tekanan pada neraca pembayaran di Indonesia yang tercatat mengalami defisit sebesar USD 7,1 Miliar pada tahun 2018, dan diproyeksikan dalam 5 tahun kedepan akan menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Pada tahun yang sama, terdapat 303,4 juta perjalanan wisatawan nusantara dengan pertumbuhan 12,37%, disertai total pengeluaran wisatawan sebesar Rp291 triliun, dengan tingkat pertumbuhan belanja sebesar 17,9% (Kementerian Pariwisata, 2019).

Pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 sepertinya akan merubah proyeksi 5 tahun tersebut mengingat sektor ini salah satu yang paling banyak tertekan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia.Pemberlakukan PSBB di sejumlah daerah dan terhentinya aktivitas pariwisata di Indonesia akibat penyebaran Covid-19 ini berdampak pada penurunan jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia. Penurunan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia juga berdampak pada sektor-sektor pendukung industri pariwisata di Indonesia lainnya, diantaranya adalah tingkat hunian hotel, industri layanan makanan dan minuman, penyedia jasa transportasi, dan industri lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan industri pariwisata. (Paludi, 2022). Untuk menyelamatkan industri pariwisata akibat pandemi Covid-19 ini hendaknya pemerintah melanjutkan dan memperluas cakupan program stimulus untuk sektor pariwisata yang meliputi ; insentif tiket untuk destinasi wisata diperluas cakupannya, kompensasi pajak hotel/restoran, hibah pariwisata, dan lain-lain. Dengan demikian, kecepatan pemulihan untuk industri pariwisata bertumpu pada apa yang dilakukan para pemangku kepentingannya selama periode transisi dari yang lama ke new normal. (Roxas et al., 2022).

Berikut merupakan bagan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pasca pandemic di Indonesia

Bagan 1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pasca Pandemic di Indonesia

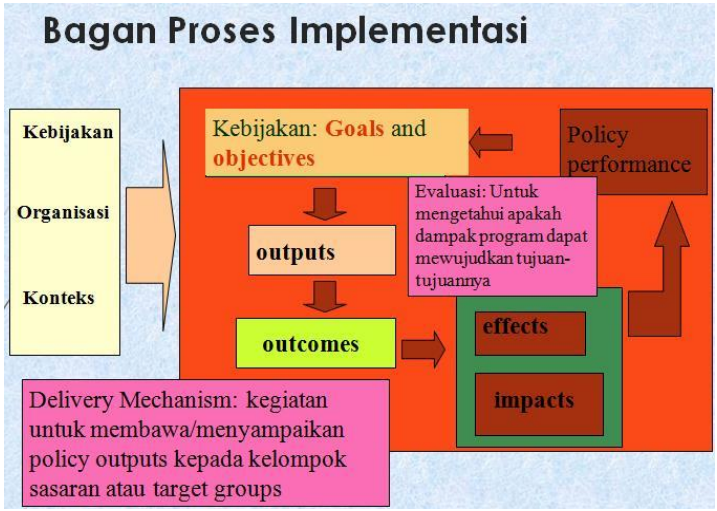

Sumber: Media Online, 2023

Pada bagan ini jelas terlihat bahwa suatu kebijakan diambil atau ditetapkan setelah adanya isu yang dimobilisasikan dalam hal ini adalah penyebaran wabah Covid-19. Kebijakan yang diambil saat ini adalah New Normal dalam bidang pariwisata). Goals kebijakan ini adalah menghindari adanya penyebaran yang semakin luas dari wabah Covid-19. Langkah ini bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit, seperti diatur dalam pasal 59 ayat 2, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Seperti diatur dalam pasal 59 ayat 3, pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi: liburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Sedangkan, kriteria dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Objeknya adalah seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan. Dalam proses implementasi, terdapat output dan outcome, yang berarti dalam proses kebijakan terdapat hasil berupa produk (output) dan hasil dari akibat (outcomes). Maka dari itu output yang merupakan hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh para implementor dalam kurun waktu tertentu. Output dari kebijakan ini adalah penerapan social distancing sebagaimana harapannya dengan mengurangi interaksi dalam

masyarakat sehingga dapat memutus rantai penyebaran Covid-19. Outcome yang merupakan hasil dari akibat pelaksanaan produk kebijakan ternyata dalam kebijakan PSBB ini, tidak terlalu menunjukkan hasil seperti yang diinginkan memunculkan sebuah kebijakan. (Azizi et al., 2021).

Kebijakan pemerintah yang diambil dalam mengembangkan sektor pariwisata yaitu:kebijakan pemerintah mengedepankan social safety net atau kesadaran pengelola dan pengunjung dalam berinteraksi karena kesehatan dan kebersihan menjadi prioritas.Dalam pembukaan sektor pariwisata saat ini maka diperlukan pertimbangantren wisata yang berubah menjadi lebih mengutamakan kebutuhan dasar pariwisata yaitu health, hygiene, safety, dan security. Selain itu preferensi liburan akan bergeser ke alternatif liburan yang tidak banyak orang seperti solo travel tour, wellness tour, termasuk juga di dalamnya virtual tourism serta staycation. Pemerintah pusat meminta jajarannya melakukan inovasi dan perbaikan di sektor pariwisata. Protokol new normal yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan harus siap saat menyambut wisatawan.

Kebijakan dalam membangun sektor pariwisata ada tiga aspek yang harus ada, yaitu Sustenance (kemampuan untuk mempertahankan eksitabilitas dari destinasi), Self Esteem (mengajak masyarakat terlibat dalam mengelola pariwisata.) dan Freedom from servitude (pemberian kebebasan daerah dalam mengelola pariwisata). Salah satu upaya pengembangan pariwisata dalam era new normal yaitu bentuk kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sektor wisata dengan cara mendorong wisata in city atau wisata dalam kota yang mana pemerintah akan fokus meningkatkan wisata domestik. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan bahwa para wisatawan akan melakukan kunjungan in city di daerah-daerah saja. Pemerintah pusat akan mendorong in city activation bersama pemerintah daerah dan pariwisata dan asosiasi menawarkan paket yang sifatnya in city.

Akibat pandemi Covid-19, tren wisata juga mengalami pergeseran. Pengunjung wisata memilih destinasi wisata menerapkan protokol kesehatan Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability. Ada beberapa pergeseran tren wisata akibat pandemi Covid-19 yang bahkan akan terus berlanjut walaupun pandemi Covid-19 telah usai, yaitu:

a Virtual Tourism: Pengunjung wisata menggunakan teknologi secara online

dengan kombinasi visual, suara dan narasi.

b Staycation: staycation saat ini menjadi pilihan tepat. Bisa berlibur mengunjungi tempat wisata yang lokasinya tidak jauh.

c Road Trips: Berkendara ke destinasi terdekat bersama keluarga dan teman-teman dalam kelompok yang terbatas.

d Wisata Alam: memilih destinasi wisata yang sepi/menghindari keramaian saat pandemi seperti bermain di pantai, mendaki gunung, menyusuri sungai, dan menjelajahi desa. (Suryani et al., 2022).

Mempertahankan kebutuhan wisata tidaklah mudah tetapi dalam waktu yang bersamaan,pemerintah daerah juga harus melihat ancaman yang ditimbulkan dalam menjaga keutuhan destinasi tersebut. setidaknya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam tatanan new normal ini terkait membuka serta mempertahankan sebuah destinasi wisata. yaitu: Pertama, Standard Operasional Prosedur, tentu SOP yang akan diterapkan di sektor pariwisata akan disiapkan, berbagai macam bidang SOP tersebut itu banyak kaitannya misalnya di hotel,restoran, dan lain-lain yang akan diterapkan. Kedua, Melakukan simulasi untuk menjalankan SOP. usai menjalankan simulasi tersebut, sektor pariwisata memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Ketiga, Uji coba. penerapan uji coba ini harus didasarkan pada wilayah yang sudah berada di zona hijau.

Media menjadi salah satu pusat jembatan informasi antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk informasi mengenai perkembangan sektor pariwisata yang seharusnya dapat menjadi harapan bagi masyarakat untuk survive dan bersiap memulai New Normal dengan protokol khusus sektor pariwisata. Namun realitanya justru banyak berita negatif yang beredar, tingginya antusiasme masyarakat dalam memandang berita panas seperti angka kematian menyebabkan media terus menggoreng isu tersebut untuk mendapat traffic penonton dengan jumlah yang tinggi, sehingga terbentuk kepanikan masyarakat yang membuat sebagian masyarakat kehilangan harapan untuk bertahan di situasi sulit seperti saat ini. (Edy Sutrisno, 2021).

Upaya lain dalam konsep pariwisata di era new normal ini adalah konsep yang berbasis pada kerelawanan dan solidaritas. Konsep ini disebut Voluntourism, yang bermakna melakukan perjalanan wisata sambil menjadi sukarelawan. Voluntourism bisa menjadi solusi tepat untuk pemulihan sektor pariwisata di masa

new normal. Pandemi Covid-19 yang melahirkan krisis di banyak bidang kehidupan memberikan peluang bagi masyarakat sipil dan pemerintah untuk memperkokoh solidaritas sebagai kenormalan baru.

Tingkat kerawanan tinggi yang dimiliki penduduk Indonesia merupakan bekal strategis untuk mewujudkan kenormalan baru. Kepedulian warga dalam program voluntourism yang dijalankan juga sangat penting demi menjaga solidaritas sosial dan modal sosial tetap ada dan dimiliki bersama. Dan yang terakhir adalah bagaimana kepedulian terhadap aktivitas leisure dan peduli terhadap alam, budaya, lingkungan, dan sesama. Selain itu juga menjaga keamanan, keselamatan dan mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah juga harus menuangkan dalam tatanan era new normal terkait konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Sebab, paham sustainable development menekankan pada kesadaran dalam penggunaan sumber daya yang digunakan untuk proses perumahan, industri transportasi atau rekreasi (Trindade, 2017: 1). Pembangunan berkelanjutan juga menerangkan adanya keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan. Konsep sustainable development sering mendengungkan bahwa harus mencapai titik keseimbangan antara kelestarian lingkungan, ekonomi dan sosial (Mensah and Sandra, 2019:15).

Pembangunan pariwisata di era new normal tidak terlepas dari tiga elemen tersebut. oleh sebab itu pemerintah harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dalam membuka atau menunda pembukaan sektor pariwisata. Standar baru, kebiasaan baru, dan kultur baru di sektor pariwisata harus dikembangkan sehingga produk baru pariwisata yang tepat dan memuaskan pun dapat dikreasikan dan disodorkan kepada para wisatawan era new normal. Disini peran pemerintah dalam mengambil keputusan sangat sensitif. Apalagi pemerintah harus melihat dependensi masyarakat terhadap sektor pariwisata. tidak sedikit masyarakat merasa kesulitan ketika objek wisata diberhentikan. Ini menjadi pertimbangan yang sulit bagi pemerintah. Oleh karena, masyarakat dan lainnya harus saling membantu dan bergotong royong dalam menyelesaikan persoalan publik. koordinasi, kepatuhan dan kerjasama yang baik yang bisa menyelesaikan pandemic ini dan menyongsong tatanan new normal yang baik.

Pelaksanaan dan pengelolaan sektor pariwisata terutama setelah berakhirnya pandemi harus berkaca dari pengalaman. Kewaspadaan dan kesiagaan perlu

diutamakan daripada hanya sekadar kepanikan dan kekhawatiran terhadap hal yang belum tentu berkorelasi. Selain itu, kebersihan dan kesehatan merupakan poin penting yang harus lebih diperhatikan. Pengadaan dan penambahan fasilitas kebersihan dan kesehatan yang sesuai dengan standar di tempat wisata serta tempat umum dapat mengawali langkah ini. Mengingat pentingnya untuk tetap menjaga jarak antar wisatawan maka pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait juga perlu menyiapkan kebijakan atau peraturan pendukung yang dapat mencegah kerumunan.

Pemangku kepentingan pariwisata perlu dapat membaca pergeseran minat berwisata pasca pandemi. Model-model wisata yang mampu memecah konsentrasi massa adalah alternatif paling bijak untuk segera kembali menghidupkan pariwisata, sekaligus mengurangi penyebaran penyakit sebelum wabah betul-betul hilang. Kemudian, tumbuhnya teknologi merupakan peluang berinovasi untuk membangun pariwisata digital sebagai strategi diversifikasi yang berpotensi untuk mendatangkan wisatawan secara virtual. Sedangkan untuk jangka panjang, prospek wisata berupa dark tourism dapat dikembangkan sebagai bentuk pariwisata sejarah dan edukasi pada masa yang akan datang.

PENUTUP

Munculnya wabah penyakit covid-19 melumpuhkan aktivitas sumber perekonomian secara global, termasuk aktivitas yang didapat dari sektor pariwisata di Indonesia. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Indonesia. Pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk mengembangkan serta menumbuhkan kembali perekonomian dari sektor pariwisata dengan berbagai strateginya. Salah satu kebijakan dalam pengembangan sektor pariwisata yaitu dalam tatanan new normal. Pengembangan pariwisata dalam tatanan new normal adalah salah satu sektor tersulit dalam mendesain pelaksanaannya karena sektor pariwisata merupakan sektor terbesar yang berpotensi dalam penyebaran covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan tiga elemen dari teori kuncoro, yaitu sustenance, self esteem dan freedom from servitude, yang mana jika syarat dalam memenuhi protokol kesehatan dalam tatanan new normal dipatuhi maka tiga elemen tersebut akan terimplementasikan dengan baik. Ketiga elemen ini juga menjadi pertimbangan besar bagi pemerintah untuk

membuka atau menunda operasi sektor pariwisata karena pengaruhnya terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan sangat besar. Strategi atau upaya pemerintah lainnya dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang bisa dijalankan dalam sektor pariwisata di era new normal yaitu wisata in city atau wisata di daerah-daerah saja dengan mempromosikan wisata daerah, bersifat kerelawanan dan solidaritas serta mengambil kebijakan dengan basis sustainable development.

DAFTAR PUSTAKA

Anak Agung Adi Lestari, S.H., M. H., & Ni Putu Noni Suharyanti, S.H., M. . (2020). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, *2*(2). https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2.1376

Azizi, A. W., Larasati, E., & Yuniningsih, T. (2021). Pengembangan Pariwisata dalam Menyongsong New Normal. *SANGKEP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, *4*(2), 129–147. https://doi.org/10.20414/sangkep.v4i2.2913

Chaerunnisa, S. F., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, *9*(4), 159–175.

Edy Sutrisno. (2021). Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor Umkm dan Pariwisata. *Jurnal Lemhannas RI*, *9*(1), 167–185. https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.385

Herdiana, D. (2020). Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Pariwisata Pasca Wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung. *Jurnal Magister Pariwisata (JUMPA)*, *2019*(July), 1. https://doi.org/10.24843/jumpa.2020.v07.i01.p01

Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, *3*(2), 105–117.

Kanom, Nurhalimah, & Darmawan, R. N. (2020). Recovery Pariwisata Banyuwangi Pasca Covid 19. *Media Bina Ilmiah*, *15*(3), 4257–4266.

Muhammad Misbahul Munir. (2021). Resiliensi Ekonomi Rumah Tangga Muslim Yogyakarta Masa Adaptasi Pandemi Covid-19. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, *4*(1), 1–7. https://doi.org/10.31949/maro.v4i1.856

Mutiarin, D., Utami, S., & Damanik, J. (2021). New Normal Policy: Promosi Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Covid-19. *Jurnal Kepariwisataan: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, *5*(1), 20–33. https://doi.org/10.34013/jk.v5i1.277

Obot, F., & Setyawan, D. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan. *Jurnal*

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, *6*(3), 113–120. https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1469

Paludi, S. (2022). Setahun Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Industri Pariwisata Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, *19*(01), 49–60. https://doi.org/10.25134/equi.v19i01.4337

Pambudi, A. S., Fikri Masteriarsa, M., Dwifebri, A., Wibowo, C., Amaliyah, I., Adhitya, D., & Ardana, K. (2020). Majalah Media Perencana Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Volume. *Majalah Media Perencanaan*, *1*(1), 1–21. https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/1

Roxas, F. M. Y., Rivera, J. P. R., & Gutierrez, E. L. M. (2022). Bootstrapping tourism post-COVID-19: A systems thinking approach. *Tourism and Hospitality Research*, *22*(1), 86–101. https://doi.org/10.1177/14673584211038859

Sinaga, K., Nasution, M. A., & Dewi, A. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, *8*(1), 79–90. https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.163

Suardana, I. wayan. (2016). Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata (Intervensi Melalui Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan di Bali). *Seminar Nasional Pariwisata Berkelanjutan*, *April*, 1–26.

Suastika, I. M. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Dan Upaya Pemulihan Pariwisata. *Jurnal Akademisi Dan Praktisi Pariwisata*, *1*(1), 41–51. http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/sista/article/download/1445/1136

Sugiharta, I. D. G. (2020). Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, *4*(2), 191–206. https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.113

Suryani, I., Sagiyanto, A., & Leliana, I. (2022). Strategi Komunikasi Dalam Industri Pariwisata Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Public Relations-JPR*, *3*(1), 93–98.

Tran-Nam, B., Le-Van, C., & Nguyen, N.-A. (2021). A critical examination of policy objectives and instruments for a sustainable and inclusive post-pandemic recovery. *Fulbright Review of Economics and Policy*, *1*(2), 140–157. https://doi.org/10.1108/frep-09-2021-0053

Trisnawati 1, Y., Sunaryo 2, B., Jurusan, M., Wilayah, P., Kota, D., Kunci, K., Moda, K., Umum, T., Bermotor, T., & Malioboro, K. (2014). Keberadaan Moda Transportasi Umum Tidak Bermotor Dalam Mendukung Aktivitas Pariwisata Di Kawasan Malioboro, Yogyakarta. *Jurnal Teknik PWK*, *3*, 1013–1024. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk

Vianti, O., Kagungan, D., & Yulianti, D. (2021). Owned by Author(s), published by Administrativa. This is an open-access article under CC-BY-SA. *Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, *3*(1), 103–110.

Yasinta, I. V., Hariani, D., & Herawati, A. R. (2021). *Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Kepariwisataan Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19*.